

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Adang Supriyadi, *Airmanship*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 183.
- Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 160.
- Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law*, (London-Sydney-Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004), hlm. 589.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007) hlm.579
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, (Jakarta: Konpress, 2005)., hlm. 2.
- KBBI. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Online.<https://kbbi.web.id/rekrutmen>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2024.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), hlm. 166.
- Maruarar Siahaan, *Judicial Review Di Indonesia: Dalam Teori, Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek*, TMS Publisher, Jakarta, 2018, hal. 31
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 60.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57.
- Muhammad Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm, 31.

- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 58.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 141-169.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 320.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumeteri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 53.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 26.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 31.
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm 164.
- Soimin, & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (1st ed.). UII Press. Hlm 49.
- Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 11.
- Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 15.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: iLiberty, 2008), 170.
- Suharyo (et. al), *Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham RI, 2017, hlm. 32.

JURNAL

- Adeline Dyah Kasetyaning Putri & Yohanes Suwanto, Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 4, 2022, hlm. 604,
- Arifin, B. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Al-Qanun*, 23(1), 127.
- Deltiya Cahayani, et.al, 2024. Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.3. hlm.173.
- Eddyono, L. W. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 25.
- Fahmiron. (2016). Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Litigasi*, 17(2).
- Gaffar, Jenedri. 2023. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10 (1).
- Imam Subechi. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No.3. hlm 345.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 411.
- Maulidi, A. (2019, Juni). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).
- Palguna, I. D. G. (n.d.). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. *Jurnal Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*.
- Satrio, A. (2015). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politics. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 121.

- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm 164.
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(5).
- Suparto. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 116.
- Sutiyoso, B. (n.d.). Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 28.
- Utama, R. Y., & Saraswati, R. (2021). Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 51.
- Utami, N. S., Suteki, Saraswati, R., & Budiono, A. (2018). Faith In God, Independence of Law and Independence of Judges (Study of Theistic Legal Realism In Legal Settlement). *Jurnal Islamica*, 15(2), 196.
- Wantu, F., Nggilu, N., Imran, S., & Arief, S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 249.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 1*. Jakarta, 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14. Jakarta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93. Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta, 2009.

INTERNET

91 *Adagium Hukum Keren dan Artinya, Anak Hukum Wajib Tahu*. (n.d.). Hukumonline. dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/>. Diakses 4 Desember 2024.

Ady Thea, 2022, “Akademisi Beberkan Indikasi Motif Politik Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto”, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-indikasi-motif-politik-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-lt636b34a52d8d0/>>, diakses pada 30 November 2024.

Ady Thea, “4 catatan PSHK terhadap proses Pemilihan Calon Hakim MK Usulan DPR”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-catatan-pshk-terhadap-proses-pemilihan-calon-hakim-mk-usulan-dpr-lt6513b486333dd/?page=2>, Diakses pada 5 Maret 2025.

Ash. Belum Semua Negara Mengadopsi Bangalore Principles. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/belum-semua-negara-mengadopsi-ibangalore-principlesi---lt4f23ccb39e887/>. Diakses 18 Desember 2024

Bernadetha Aurelia, “Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>. Diakses pada 22 Februari 2025.

Cahya Dicky Pratama, (2020), Peran Lembaga Peradilan di Indonesia, lihat pada <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/>

10/06/154611569/peran-lembaga-peradilan-di-indonesia.diakses tanggal 10 Februari 2025.

Eva Safitri, “Ucap Sumpah di depan Jokowi, Arsul Sani Resmi jadi Hakim MK”,
<https://news.detik.com/berita/d-7147467/ucap-sumpah-di-depan-jokowi-arsul-sani-resmi-jadi-hakim-mk>, Diakses pada 5 Maret 2025.

Hakim Konstitusi Usulan DPR Bukan Representasi dan Perpanjangan Tangan DPR - pshk.or.id. (2023, September 26). By PSHK. dari <https://pshk.or.id/publikasi/hakim-konstitusi-usulan-dpr-bukan-representasi-dan-perpanjangan-tangan-dpr/> Diakses 2 Desember 2024.

Halim, Daviena. “Sikap DPR soal Pendapat Panel Ahli dalam Seleksi Calon Hakim MK Dinilai Tidak Konsisten”
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/12/07285641/sikap-dpr-soal-pendapat-panel-ahli-dalam-seleksi-calon-hakim-mk-dinilai>.
Diakses 3 Maret 2025

Humas Setkab, “Siang Ini, Hasil Seleksi Hakim MK Pengganti Hamdan Dilaporkan ke Presiden”,<https://setkab.go.id/siang-ini-hasil-seleksi-hakim-mk-pengganti-hamdan-dilaporkan-ke-presiden/>, Diakses pada 4 Maret 2025.

Humas Setkab, “Siaran Pers: Presiden Joko Widodo Bentuk Pansel Calon Hakim Konstitusi yang Diajukan Presiden”,
https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_presiden_joko_widodo_bentuk_pansel_calon_hakim_konstitusi_yang_diajukan_presiden, Diakses pada 5 Maret 2025.

ICW, “Cabut Kepres yang Cacat Hukum dan Segera Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi”,<https://antikorupsi.org/id/article/cabut-kepres-yang-cacat-hukum-dan-segera-seleksi-calon-hakim-mahkamah-konstitusi>,
Diakses pada 4 Maret 2025

Detik News, “Lagi, Seteru MA vs KY dalam Pemilihan Hakim Konstitusi Suhartoyo”,
<https://news.detik.com/berita/d-2769946/lagi-seteru-ma-vs-ky-dalam-pemilihan-hakim-konstitusi-suhartoyo>, Diakses pada 5 Maret 2025.

Indonesia Corruption Watch, 2017, Independensi dan Imparsialitas Hakim, lihat pada <https://antikorupsi.org/id/article/independensi-dan-imparsialitas-hakim>, diakses tanggal 10 Februari 2025.

Intan Fradila, (2023), Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim dan Marwah Pengadilan, lihat pada : <https://kawanhukum.id/kepercayaan-publik-terhadap-integritas-hakim-dan-marwah-pengadilan/2/> , diakses tanggal 25 Februari 2025.

Komisi Yudisial. (2016, Maret 18). *Penerapan Etika Bagian Pencegahan KY*. Judicial Commission The Republic of Indonesia. Dari https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/80/penerapan-etika-bagian-pencegahan-ky. Diakses 1 Desember 2024

MA, “Mahkamah Agung Gelar Seleksi Terbuka Calon Hakim Konstitusi”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5836/mahkamah-agung-gelar-seleksi-terbuka-calon-hakim-konstitusi>, diakses 3 Maret 2025.

Marlina Oktavia, “Daniel Yusmic Resmi jadi Hakim Konstitusi Gantikan Palguna”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilHakim> Diakses pada 5 Maret 2025.

MK, “Anwar Usman Kembali Ucapkan Sumpah Sebagai Hakim Konstitusi” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, diakses pada 15 Oktober 2024.

MK. “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi.” (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>. Diakses pada 20 Februari 2025.

Nafiatul Munawaroh, “Mengenal Jenis-Jenis Putusan MK”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-putusan-mk-lt581c0c98aa2ee/>. Diakses pada 22 Februari 2025.

Rofiq Hidayat, “Wahiduddin dan Aswanto Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wahiduddin-dan-aswanto-terpilih-sebagai-hakim-konstitusi-lt5317deff535fc/>, Diakses pada 5 Maret 2025.